

Pengaruh *Whistleblowing System* dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi

Alya Isbandi^{1*}, Eka Fauzihardani²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: isbandialya@gmail.com

Tanggal Masuk:

29 Juli 2024

Tanggal Revisi:

23 November 2024

Tanggal Diterima:

03 Januari 2025

Keywords: *Fraud*

Prevention; Individual Morality; Internal Control System; Whistleblowing System.

How to cite (APA 6th style)

Isbandi, A., & Fauzihardani, E. (2025). Pengaruh *Whistleblowing System* dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 7 (1), 1-15.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v7i1.2026>

Abstract

The study aims to examine the impact of the whistleblowing system and internal control system on fraud prevention with morality as a moderating variable. The theoretical foundation used in this research is the gone theory. The sampling method employed is purposive sampling, with respondents being employees of the Padang City Government Office. The respondents include employees holding positions as Head of Division and those in the Finance Department. The type of data used in this study is primary data, using a questionnaire distributed directly to 22 Padang City Government Office. The statical method used in this research is moderation regression analysis using IBM SPSS Statistics version 26. The statistical test result indicates that: (1) The whistleblowing system has a significant positive effect on fraud prevention; (2) The internal control system has no effect on fraud prevention; (3) Individual morality as a moderating variable is not able to moderate the effect of whistleblowing system on fraud prevention; (4) Individual morality is able to moderate the effect of internal control system on fraud prevention.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kecurangan (*fraud*) pada sektor publik dan sektor swasta telah menjadi perhatian utama di berbagai negara. Kecurangan yang terjadi pada sektor publik dapat menimbulkan kerugian finansial dan juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Kecurangan merupakan tindakan yang tidak jujur dilakukan seseorang yang akan menimbulkan konsekuensi buruk bagi orang lain (Mukoro et al., 2011). *Association of certified fraud examiners* (ACFE) mengkalsifikasikan *fraud* tiga jenis yaitu kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi. ACFE mengeluarkan tajuk *Asia-Pacific* yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke empat dengan tingkat kecurangan kasus korupsi sebesar 64% (ACFE, 2022), sedangkan pada tahun 2023 menurut laporan *transparency international* Indonesia (TII) menempatkan Indonesia di urutan 115 dari 118

negara dengan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia sebesar 30 poin dari skala 100 yang artinya di Indonesia masih rentan terjadi korupsi.

Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk keuntungan pribadi mereka (Everett et al, 2007). Kasus kecurangan korupsi ini dapat merusak reputasi pemerintah dan menghambat kinerja efektif dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Adapun alasan orang untuk melakukan kecurangan menurut (Bologna, G. Jack, 1993) dalam buku (BPKP, 2008) berdasarkan GONE theory yaitu *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan) dan *exposure* (pengungkapan). Fenomena kasus korupsi ini telah merajalela di Indonesia. Salah satu kasus korupsi yang telah terjadi pada tahun 2021 pada website www.detik.com yang menjerat pejabat di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemerintah Provinsi Sumatera barat terkait pengadaan sapi yang menelan anggaran sebesar Rp35.017.340 miliar, akibat yang timbul atas kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp7,3 miliar (Abdi, 2023).

Pada tahun 2023 juga terungkap kasus korupsi terkait pembangunan jalan dan jembatan serta pembangunan jalan non status di Desa Saumanganya yang dilakukan oleh pejabat yang bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mentawai www.detik.com. Menurut hasil perhitungan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebesar Rp4,9 miliar (Afrianto, 2023). Selain itu, kasus korupsi yang diungkapkan pada tahun 2024 di www.antarnews.com yang dilakukan oleh pejabat Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2021 dengan total anggaran mencapai Rp18 miliar terkait pengadaan peralatan praktik SMK, berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh auditor internal kejaksaan tinggi Sumatera Barat total kerugian negara sebesar Rp5,5 miliar (Abdi, 2024).

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi akan mengakibatkan kerugian keuangan yang akan dapat menghambat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta dapat menghambat pembangunan yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kecurangan pada sektor publik ini dapat diminimalisir dengan mekanisme pencegahan yang efektif (Joseph et al, 2021). Menurut Button et al dalam (Chairi et al., 2022) setiap instansi atau lembaga harus mendeteksi masalah kecurangan dan mengatasinya dengan bijak agar dapat bertahan dan dapat menjaga keberlangsungan usaha organisasi. Menciptakan lingkungan organisasi yang baik merupakan salah satu pencegahan *fraud* dengan tujuan memperkecil kesempatan terjadinya penipuan (Omar, N., & Bakar, 2012) dalam (Joseph et al, 2021). Oleh karena itu perlu adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menegakkan kebijakan pencegahan kecurangan (*fraud*). Pencegahn *fraud* merupakan strategi atau langkah dan tindakan yang diambil oleh organisasi untuk menghindari terjadinya kecurangan yang akan terjadi (Harahap et al, 2021). Adapun beberapa tindakan yang dapat diambil pemerintah untuk mengurangi dan menghentikan kecurangan yang terjadi yaitu melalui penerapan *whistleblowing system*, karena menurut Okafor et al (2020) dengan adanya intervensi pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) dapat memberikan pengaruh dalam pemberantasan korupsi dan penipuan di Nigeria, selain itu, sistem pengendalian internal juga memainkan peran penting dalam pencegahan dan deteksi kecurangan (Yusrianti et al, 2020)

Whistleblowing merupakan pengungkapan yang dilakukan oleh anggota organisasi terkait praktik ilegal, tidak bermoral kepada pihak organisasi yang memiliki kewenangan untuk menangani masalah tersebut (Near, J. P., & Miceli 1985 dalam Chairi et al., 2022), sedangkan *whistleblowing system* merupakan sistem yang dirancang untuk praktik tata kelola organisasi yang baik dan mencegah perilaku yang menyimpang. Selain *whistleblowing system*, untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan juga diperlukan sistem pengendalian internal yang efektif dalam organisasi. Pengendalian internal salah satu cara untuk mencapai tujuan suatu entitas dengan proses yang disusun, dilaksanakan dan dikendalikan oleh pihak

yang bertanggung jawab yang dapat memberikan keandalan laporan keuangan (Agoes, 2017). Sistem pengendalian internal merupakan sistem informasi yang digunakan untuk untuk mencapai tujuan sebuah organisasi, dengan diterapkan *whistleblowing system* dengan baik dan menerapkan sistem pengendalian internal secara menyeluruh untuk memantau operasi organisasi secara teratur, maka kecurangan akan dapat terdeteksi dan ini akan dapat meningkatkan pencegahan kecurangan dalam organisasi.

Hasil penelitian terdahulu telah menguji faktor-faktor terkait pencegahan *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Okafor et al (2020), Yulian Maulida & Indah Bayunitri (2021) dan Triantoro et al (2020) menyatakan bahwa penerapan *whistleblowing system* berpengaruh dalam pencegahan *fraud*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Inawati & Sabila, (2021), Leighton Silambi et al (2023) dan Langoday (2021) menyatakan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian terkait sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Nugraha & Indah Bayunitri (2020), Handoyo & Indah Bayunitri, (2021) dan Adelana & Toba (2018) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Mufidah & Sari, (2018), Adiko et al (2019) dan Meutia (2021) menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, karena masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian terkait *whistleblowing system* dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*, maka peneliti menjadikan moralitas individu sebagai variabel *moderating* atau moderasi untuk memperkuat hubungan variabel *whistleblowing system* dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Moralitas individu berkaitan dengan sikap dan moral seseorang. Individu yang memiliki moral yang baik cenderung bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku (Kartadjudjuma, E., & Indriyati, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Okafor et al (2020) menyarankan untuk peneliti selanjutnya menambahkan faktor individu yaitu moralitas dalam mencegah terjadinya kecurangan, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Abdullahi & Mansor (2018) juga menyarankan untuk mengimplementasikan langkah pencegahan *fraud* yang lebih efektif dalam mengurangi kejadian di sektor publik dengan menambahkan faktor individu yaitu moralitas, dengan adanya moral yang tinggi dalam setiap individu seseorang, maka kesadaran seseorang akan semakin aktif untuk melaporkan segala bentuk kecurangan dan juga akan menunjang jalannya sistem pengendalian internal dengan baik, sehingga prosedur dan pengawasan di dalam organisasi akan berjalan dengan efektif. *Whistleblowing system* dan sistem pengendalian internal pada dasarnya berkaitan dengan sumber daya manusia. moralitas individu.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Okafor et al (2020) dan Triantoro et al (2020) hanya menguji pengaruh langsung *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* serta penelitian yang dilakukan oleh Nugraha & Indah Bayunitri (2020) dan Yulian Maulida & Indah Bayunitri (2021) juga hanya menguji pengaruh langsung sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Oleh karena itu peneliti tertarik menambahkan moralitas individu sebagai variabel moderasi dalam penelitian bertujuan untuk memperkuat hubungan *whistleblowing system* dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji apakah *whistleblowing system* dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi pada Dinas Pemerintah Kota Padang, karena Dinas Pemerintah Kota Padang termasuk dalam tiga besar daerah yang memiliki indeks pencegahan korupsi tertinggi di wilayah Sumatera Barat Oktawina (2023). Sampel penelitian yaitu pegawai yang bekerja pada Dinas Pemerintah Kota Padang.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori GONE

GONE *theory* pertama kali dikemukakan oleh Bologna, G. Jack pada tahun 1995. GONE *theory* menjelaskan terkait faktor-faktor pemicu seseorang melakukan tindakan kecurangan. GONE *theory* merupakan singkatan dari *greed* (keserakahan), *opportunity* (kesempatan atau peluang), *need* (kebutuhan) dan *exposure* (pengungkapan). Elemen GONE *theory greed* (keserakahan) dan *need* (kebutuhan) berhubungan dengan faktor individu, elemen ini berkaitan dengan moralitas individu. Elemen GONE *theory opportunity* (kesempatan atau peluang) dan *exposure* (pengungkapan) adalah faktor yang berkaitan dengan suatu entitas atau organisasi, elemen *opportunity* berhubungan dengan sistem pengendalian internal, sedangkan elemen GONE *theory exposure* berhubungan dengan *whistleblowing system*.

Pencegahan Fraud

Pencegahan *fraud* adalah langkah dan strategi yang dilakukan oleh organisasi untuk menghindari terjadinya kecurangan di dalam organisasi (Harahap et al, 2021). Pencegahan *fraud* yang efektif memerlukan keterlibatan dua kegiatan utama yaitu: Pertama, menciptakan dan memelihara budaya dengan kode etik dan kejujuran yang tinggi. Kedua, menilai resiko kecurangan dan mengembangkan tindakan nyata untuk mengurangi resiko dan memperkecil peluang terjadinya kecurangan (Albrecht et al, 2012).

Whistleblowing System

Whistleblowing merupakan pengungkapan informasi oleh seseorang terkait pelanggaran hukum, peraturan atau prosedur yang tidak tepat serta korupsi, penyalahgunaan wewenang dan sesuatu yang dapat merugikan masyarakat (Triantoro et al., 2020). *Whistleblowing* terdiri dari dua bagian yaitu *whistleblowing* internal dan external (Verschuuren, 2020). *Whistleblowing* internal dilakukan melalui sistem yang telah resmi diintruksikan oleh organisasi untuk menangani tuduhan pelaporan pelanggaran, sedangkan *whistleblowing* external merupakan pelaporan yang dilakukan oleh pihak yang tidak ditugaskan dalam organisasi, misalnya media. *Whistleblowing system* adalah sistem yang dirancang untuk meningkatkan tata kelola organisasi baik dan digunakan oleh *whistleblower* sebagai wadah untuk melaporkan tindakan kecurangan dan pelanggaran.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh pihak yang bertanggung jawab atas tatakelola, manajemen dan karyawan untuk memberikan keyakinan yang cukup guna untuk memenuhi tujuan sebuah organisasi (Agoes, 2017). Pengendalian internal bertujuan untuk memberikan keyakinan terhadap organisasi dalam mencapai tujuan operasiona, menyajikan laporan keuangan yang andal serta mematuhi hukum yang berlaku (Monteiro, 2021). Sistem pengendalian internal berperan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan serta mengarahkan dan mengukur sumber daya organisasi (Eldayanti, Indraswarawati, 2020).

Moralitas Individu

Moral merupakan salah satu faktor individu yang mempengaruhi pencegahan *fraud*. Moral merujuk kepada sifat baik atau buruknya seseorang dalam melakukan tindakan. Moral digunakan oleh seseorang untuk mengatur tingkah lakunya karena moral merupakan nilai dan norma yang menjadi pegangan oleh setiap individu (Anggara et al, 2020). Moral yang baik ditunjukkan oleh perilaku seseorang yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku (Kartadjuma, E., & Indriyati, 2021).

Hubungan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud

Whistleblowing system merupakan faktor eksternal yang digunakan oleh *whistleblower* sebagai wadah untuk mengungkapkan informasi mengenai niat seseorang untuk melakukan perilaku yang tidak etis seperti *fraud* yang dilakukan oleh anggota organisasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan (Triantoro et al., 2020). Penerapan *whistleblowing system* merupakan strategi yang paling efektif untuk pencegahan *fraud* (ACFE, 2016). *Whistleblowing system* berkaitan dengan elemen *GONE theory* yaitu *exposure* (pengungkapan) karena dengan adanya *whistleblowing system* dapat memberikan efek jera bagi pelaku kecurangan dan dapat meminimalisir keinginan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan.

Penerapan *whistleblowing system* yang efektif akan mendorong partisipasi masyarakat dan pegawai organisasi untuk lebih berani dengan melaporkan kecurangan kepada pihak yang berwenang yang bertujuan untuk mencegah kecurangan yang terjadi (Yulian Maulida & Indah Bayunitri, 2021). Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Okafor et al (2020), Triantoro et al (2020), Yulian Maulida & Indah Bayunitri (2021) dan Chairi et al (2022) menunjukkan hasil bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1: *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Hubungan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor penting untuk mencegah terjadinya kecurangan. Menurut Nugraha, R., & Bayunitri, BI (2020) langkah yang paling penting dalam mencegah kecurangan adalah dengan mengembangkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang andal untuk mengawasi aktivitas organisasi. Pengendalian internal dimaksudkan untuk memastikan tercapainya tujuan suatu organisasi melalui penyusunan prosedur dan pengawasan. Sesuai dengan *GONE theory*, sistem pengendalian internal termasuk dalam elemen *opportunity* (kesempatan atau peluang) karena pelaku kecurangan akan memanfaatkan peluang yang ada, jika lemahnya sistem pengendalian organisasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugraha & Indah Bayunitri (2020) dan Handoyo, BRM & Bayunitri, BI (2021) menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Semakin efektif sistem pengendalian internal organisasi, maka upaya pencegahan kecurangan akan semakin baik. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu:

H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Hubungan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi

Moralitas individu salah satu faktor individu yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud*. Moral memegang peran penting dalam kehidupan manusia karena berkaitan dengan kesesuaian perilaku individu dengan standar etika yang berlaku. Seseorang akan dianggap ketika perilaku mereka sejalan dengan norma-norma yang ada (Chairi et al., 2022). Berdasarkan *GONE theory* moralitas individu berkaitan dengan elemen *greed* dan *need* karena seseorang yang memiliki moral yang tinggi akan dapat menghindari berbagai tindakan penyelewengan dan kecurangan seperti keserakahan dan kebutuhan.

Seorang perlu menyadari bahwa tindakan *whistleblowing* sangat penting untuk mencegah perilaku yang dapat merugikan masyarakat. Peran *whistleblower* harus diperkuat dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat (Romadaniati, Taufeni Taufik, 2020). Semakin tinggi moralitas yang dimiliki seseorang, maka akan semakin aktif peran seseorang

untuk melaporkan segala bentuk indikasi kecurangan, dengan begitu pencegahan *fraud* akan semakin efektif. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu: **H3:** Moralitas individu dapat memperkuat pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

Hubungan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi

Pengendalian internal pada dasarnya suatu proses yang melibatkan sumber daya manusia. Seseorang yang memiliki moral yang tinggi akan dapat membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi semua aspek yang mendukung kelancaran operasional organisasi, sehingga tujuan organisasi akan tercapai. Moral merupakan nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi setiap individu atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya (Anggara et al, 2020). Berdasarkan *GONE theory* pada elemen faktor individu yaitu *greed* dan *need* berhubungan dengan moralitas individu karena dengan adanya moral yang baik pada diri seseorang akan dapat menghindari faktor individu yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan seperti elemen *greed* dan *need*.

Menurut Purwaitasari (2017) dalam penelitian Romadaniati (2020), dengan memaksimalkan sistem pengendalian internal yang efektif, maka kecurangan dapat dicegah jika ada budaya moralitas yang kuat atau sikap pribadi yang baik. Sebaik apapun sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi jika tidak di didukung dengan moral yang baik pada setiap individu pegawai, maka kecurangan akan bisa terjadi. Oleh karena itu, semakin tinggi moralitas individu, semakin efektif sistem pengendalian internal dalam organisasi sehingga tingkat pencegahan *fraud* akan meningkat. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini yaitu:

H4: Moralitas individu dapat memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode ilmiah yang datanya berbentuk angka yang dapat diolah dan dianalisis menggunakan perhitungan matematika atau statistik (Sekaran, U., & Bougie, 2016). Populasi dalam penelitian ini yaitu 22 Dinas Pemerintah Kota Padang. Metode untuk pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria responden yaitu pegawai yang memiliki jabatan sebagai kepala bidang dan pegawai yang bekerja di bagian keuangan pada Dinas Pemerintah Kota Padang. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode penelitian yang digunakan berupa survey dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada responden yaitu pegawai yang bekerja pada Dinas Pemerintah Kota Padang. Kuesioner yang disebar berjumlah 90 kuesioner, namun kuesioner yang kembali dan dapat diolah berjumlah 80 kuesioner

Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu *whistleblowing system* dan sistem pengendalian internal. Variabel *whistleblowing system* diukur menggunakan tiga indikator yaitu aspek struktural, aspek operasional dan aspek perawatan (Wardana et al, 2017). Sistem pengendalian internal diukur menggunakan lima indikator yaitu lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian resiko, informasi dan komunikasi serta pemantauan (Wardana et al, 2017). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pencegahan *fraud*, variabel ini menggunakan indikator pengukuran yaitu penetapan kebijakan anti-*fraud*,

menciptakan prosedur pencegahan baku, membangun struktur organisasi dengan pengendalian yang baik, merancang teknik pengendalian efektif dan menumbuhkan kepekaan terhadap kecurangan (Nuryatno, M., & Wulandari, 2018). Variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu moralitas individu, dengan indikator pengukuran variabel yaitu kesadaran seorang pegawai terhadap tanggung jawab yang diberikan, kesadaran dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika, menaati semua aturan yang berlaku di dalam organisasi dan sikap individu dalam melakukan tindakan tidak jujur (Rosari et al., 2021). Adapun model persamaan penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_1*X_3 + \beta_5X_2*X_3 + e$$

Keterangan:

α	= Konstanta
Y	= Pencegahan <i>fraud</i>
X1	= <i>Whistleblowing system</i>
X2	= Sistem pengendalian internal
X3 (Variabel Moderasi)	= Moralitas individu
β	= Koefisien Regresi
e	= Standar eror

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Deskriptif

Hasil analisis data deskriptif variabel *whistleblowing system*, sistem pengendalian internal, pencegahan *fraud* dan moralitas individu dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Whistleblowing System</i>	80	19	40	28,06	4,645
Sistem Pengendalian Internal	80	35	65	49,88	8,277
Pencegahan <i>Fraud</i>	80	28	44	35,76	3,846
Moralitas Individu	80	15	29	23,24	2,659
Valid N (listwise)	80				

Berdasarkan tabel 1 diatas, pada penelitian memiliki 80 responden. Variabel *whistleblowing system* menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar 19, nilai maksimum sebesar 40 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 28,06 dan standar deviasi sebesar 4,645. Variabel sistem pengendalian internal diketahui nilai minimum sebesar 35 sedangkan nilai maksimum sebesar 65, rata-rata (*mean*) sebesar 49,88 dengan standar deviasi sebesar 8,277. Variabel pencegahan *fraud* diketahui nilai minimum sebesar 28, nilai maksimum sebesar 44, rata-rata (*mean*) sebesar 35,76 dan standar deviasi sebesar 3,846. Variabel moralitas individu diketahui nilai minimum sebesar 15, nilai maksimum sebesar 29 dengan rata-rata (*mean*) sebesar 23,24 dan standar deviasi sebesar 2,659.

Uji Kualitas Data

Pada penelitian ini jumlah sampel atau (n)= 80 dan r tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 0,220. Hasil uji validitas diperoleh seluruh item pernyataan setiap variabel memiliki r hitung > dari r tabel 0,220 yang dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan valid. Hasil uji reliabilitas untuk seluruh variabel memiliki nilai *cronbach alpha* > 0,60 yang artinya seluruh instrumen dalam penelitian ini reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,91821516
Most Extreme Differences	Absolute	,059
	Positive	,052
	Negative	-,059
Test Statistic		,059
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan metode *Kolmogrov-Smirnov*, dapat dilihat pada tabel 2 diatas nilai Asymp. Sig sebesar $0,200 > 0,05$. Mak dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi syarat karena nilai sig lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1 (Constant)	11,976	2,362		5,071	,000	
Whistleblowing System	,298	,057	,360	5,215	,000	,687 1,455
Sistem Pengendalian Internal	,283	,032	,609	8,818	,000	,687 1,455
Moralitas Individu	,057	,083	,039	,687	,494	,994 1,007

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* variabel *whistleblowing system* sebesar $0,687 > 0,10$, sistem pengendalian internal sebesar $0,687 > 0,10$ dan moralitas individu sebesar $0,994 > 0,10$. Nilai VIF untuk variabel *whistleblowing system* sebesar $1,455 < 10$, sistem pengendalian internal sebesar $1,455 < 10$ dan moralitas individu sebesar $1,007 < 10$. Maka dapat disimpulkan bahwa bahwa tidak terjadi multikolinearitas karena masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4
Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	1,575	1,331		1,184	,240
<i>Whistleblowing System</i>	-,003	,032	-,012	-,087	,931
Sistem Pengendalian Internal	-,007	,018	-,050	-,363	,717
Moralitas Individu	,017	,047	,043	,371	,711

a. Dependent Variable: ABSE_RES

Berdasarkan tabel 4 diatas, menunjukkan bahwa nilai sig variabel *whistleblowing system* sebesar 0,931, sistem pengendalian intern sebesar 0,717 dan moralitas individu sebesar 0,711 yang artinya nilai sig masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Regresi Moderasi

Uji Adjusted R-Square

Hasil uji *adjusted r-square* dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5
Uji Adjusted R-Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,866 ^a	,750	,743	1,949

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, *Whistleblowing System*

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,743 atau 74,3% yang artinya kontribusi variabel independen yaitu *whistleblowing system* dan sistem pengendalian internal mempengaruhi variabel dependen yaitu pencegahan *fraud* sebesar 74,3%, sedangkan sisanya 25,7% dipengaruhi oleh variabel lain.

Uji F

Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6
Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	877,803	3	292,601	76,501	,000 ^b
Residual	290,684	76	3,825		
Total	1168,488	79			

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud*
b. Predictors: (Constant), Moralitas Individu, *Whistleblowing System*, Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000, hal ini membuktikan bahwa variabel *whistleblowing system*, sistem pengendalian internal dan moralitas individu berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu pencegahan *fraud*.

Uji Hipotesis (*Moderated Regression Analysis*)

Hasil pengujian hipotesis atau uji t (*moderated regression analysis*) pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7
Uji MRA Model

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15,217	12,486		1,219	,227
<i>Whistleblowing System</i>	1,335	,519	1,613	2,573	,012
Sistem Pengendalian Internal	-,372	,277	-,801	-1,341	,184
Moralitas Individu	-,122	,535	-,084	-,227	,821
<i>Whistleblowing System</i> *Moralitas Individu	-,045	,022	-1,614	-2,037	,045
Sistem Pengendalian Internal*Moralitas Individu	,029	,012	1,804	2,369	,020

a. Dependent Variable: Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan tabel diatas, dapat disusun persamaan regresi moderasi sebagai berikut:

$$Y = 15,217 + 1,335 - 0,372 - 0,122 - 0,045 + 0,029$$

Apabila nilai signifikansi < 0,05 atau t hitung > tabel, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini t tabel dengan n=80 dengan tingkat signifikansi 0,05 diketahui sebesar 1,666. Arah nilai beta (β) sesuai dengan arah hipotesis, apabila nilai β yang dihasilkan positif, maka arah pengaruh positif sedangkan jika nilai β yang dihasilkan negatif, maka arah pengaruh negatif.

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi moderasi pada tabel 7 diatas maka dapat disimpulkan bahwa variabel *whistleblowing system* (X1) memiliki nilai signifikansi $0,012 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $2,573 > 1,664$ (t tabel). Nilai β yang dihasilkan sebesar 1,335 yang artinya arah pengaruh positif. Hal ini menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan *fraud*, sehingga hipotesis pertama (H1) diterima.

Variabel sistem pengendalian internal (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,184 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $-1,341 < 1,664$ (t tabel). Nilai β yang dihasilkan sebesar -0,372 yang berarti arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak.

Variabel moderasi yaitu moralitas individu**whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,045 < 0,05$ dan t hitung sebesar $-2,037 < 1,664$ (t tabel). Nilai β diketahui sebesar -0,045 yang artinya arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas individu tidak mampu memoderasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*, sehingga tidak memiliki bukti yang cukup untuk menerima hipotesis ketiga atau H3 ditolak.

Variabel moderasi moralitas individu*sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$ dan t hitung sebesar $2,369 > 1,664$ (t tabel). Nilai β diketahui sebesar 0,029 yang artinya arah pengaruh positif. Hal ini membuktikan bahwa moralitas mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*, sehingga hipotesis keempat (H4) diterima.

Pembahasan

Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil uji statistik yang dilakukan mendukung hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan positif

terhadap pencegahan *fraud* pada Dinas Pemerintah Kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya *whistleblowing system* serta diterapkan dengan maksimal, maka akan semakin tinggi tingkat pencegahan *fraud*. Hal ini juga dibuktikan dengan Dinas Pemerintahan Kota Padang mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) sebagai daerah dengan nilai indeks pencegahan korupsi tertinggi di wilayah Sumatera Barat, penghargaan ini diberikan atas upaya dan komitmen Dinas Pemerintah Kota Padang dalam pencegahan pemberantasan korupsi. Hasil penelitian ini sejalan dengan GONE *theory* karena *whistleblowing system* termasuk dalam elemen *exposure* (pengungkapan). *Whistleblowing system* digunakan oleh *whistleblower* sebagai wadah untuk mengungkapkan informasi terkait dengan keadaan suatu organisasi atau kemungkinan kecurangan yang akan terjadi, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku kecuruagan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Okafor et al (2020), Triantoro et al (2020), Maulida, WY & Bayunitri, BI (2021) dan Chairi et al., (2022) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik penerapan *whistleblowing system*, maka akan semakin baik juga pencegahan *fraud* pada Dinas Pemerintah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil uji statistik yang dilakukan tidak mendukung hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan *fraud* pada Dinas Pemerintah Kota Padang, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Sistem pengendalian internal yang kurang efektif disebabkan oleh faktor kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh organisasi. Berdasarkan GONE *theory* pada elemen *opportunity* (kesempatan) yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal karena jika lemahnya sistem pengendalian internal suatu organisasi, maka kesempatan terjadinya kecurangan akan besar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mufidah & Sari (2018), Adiko et al (2019) dan Meutia (2021) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal dalam pengawasan yang dilakukan organisasi dan kurangnya evaluasi terkait aktivitas pengendalian.

Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi

Hasil uji statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas individu tidak mampu memoderasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak. Moralitas berkaitan merujuk pada sifat baik atau buruknya seseorang dalam melakukan tindakan. Berdasarkan GONE *theory*, moralitas berhubungan dengan elemen faktor individu yaitu *need* (kebutuhan). Kebutuhan biasanya timbul ketika seseorang merasa terdorong atau tertekan dalam situasi tertentu, artinya walaupun seseorang memiliki moral yang tinggi akan tetapi tidak ingin terlibat dalam proses pelaporan untuk melindungi dirinya dari konsekuensi negatif, oleh karena itu moralitas tidak dapat memperkuat pengaruh positif *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi

Hasil uji statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas individu mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*, sehingga hipotesis keempat (H4) diterima. Moralitas sejalan dengan GONE *theory* pada elemen faktor

individu *greed* dan *need*, faktor ini dapat dicegah jika seseorang memiliki moral yang tinggi sehingga dapat menghindari tindakan penyelewengan seperti *greed* dan *need*. Pada dasarnya sistem pengendalian internal berkaitan dengan sumber daya manusia, ketika individu yang memiliki moral yang tinggi akan dapat menunjang dan membantu meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal sehingga tingkat pencegahan *fraud* akan semakin efektif. Maka dengan demikian moralitas individu mampu memperkuat pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* di Dinas Pemerintah Kota Padang.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *whistleblowing system* dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa variabel *whistleblowing system* berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan *fraud*. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Moralitas individu tidak mampu memoderasi pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* dan moralitas individu mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu dalam penelitian menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner dan tidak melakukan wawancara langsung kepada responden, sehingga data yang dikumpulkan hanya berdasarkan jawaban tertulis dalam kuesioner yang berkemungkinan akan berpengaruh pada hasil penelitian dan ruang lingkup penelitian hanya dilakukan pada Dinas Pemerintah Kota Padang sehingga Dinas Pemerintah Kota/Kabupaten lain mungkin akan mendapatkan hasil yang berbeda.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, ada beberapa saran dari peneliti agar dapat menghasilkan penelitian lebih baik diantaranya: (1) Bagi pegawai Dinas Pemerintah Kota Padang diharapkan bisa memperhatikan dan meningkatkan penerapan *whistleblowing system*, sistem pengendalian internal dan moralitas individu agar pencegahan *fraud* menjadi lebih baik. (2) Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi faktor-faktor pencegahan *fraud* dan menguji kembali dengan menggunakan variabel moderasi yang berbeda serta menggunakan metode survey dengan teknik wawancara langsung kepada responden agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. (3) Bagi peneliti selanjutnya, dapat memperluas sampel penelitian, tidak hanya pada Dinas Pemerintah Kota, sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, F. (2023). *Kejati Sumbar Tetapkan Enam Tersangka Kasus Pengadaan Sapi Bunting*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/3647502/kejati-sumbar-tetapkan-enam-tersangka-kasus-pengadaan-sapi-bunting>
- Abdi, F. (2024). *Kejati Tetapkan Delapan Tersangka pada Kasus Korupsi Dinas Pendidikan Sumbar*. Antaranews.Com. <https://sumbar.antaranews.com/berita/613278/kejati-tetapkan-delapan-tersangka-pada-kasus-korupsi-dinas-pendidikan-sumbar>
- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2018). Fraud Prevention Initiatives in the Nigerian Public Sector. *Journal of Financial Crime*, 25(2), 527–544. <https://doi.org/10.1108/jfc-02-2015-0008>

- Adelana, O. O., & Toba, A. M. (2018). Internal Control System and Fraud Detection and Prevention in Nigeria: Evidence From Ondo State. *International Journal of Advanced Academic Research | Social & Management Sciences* |, 4(12), 2488–9849.
- Adiko, R. G., Astuty, W., & Hafisah. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Etika Auditor, dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud PT Inalum. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 2(1), 52–68.
- Afrianto, M. A. (2023). *Korupsi Rp 4,9 M di Dinas PUPR Mentawai, 3 Orang Jadi Tersangka*. Detik Sumut. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7028546/korupsi-rp-4-9-m-di-dinas-pupr-mentawai-3-orang-jadi-tersangka>
- Agoes, S. (2017). *Auditing : Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik* (5th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Albrecht, W. Steve, Conan C. Albrecht, Chad O. Albrecht, & M. F. Z. (2012). *Fraud Examination* (4th ed.). Mason: South Western Cengage Learning.
- Anggara, M. R., Sulindawati, N. E., & Yasa, I. P. (2020). Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Individu, dan Integritas terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) pada Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa Se-Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(3).
- Bologna, G. Jack, R. J. L. (1993). *The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime*. Wiley.
- BPKP, I.-P. (2008). *Fraud Auditing*. Pusdiklatwas BPKP.
- Button, M., Lewis, C., Shepherd, D., & Brooks, G. (2015). Fraud in Overseas Aid and the Challenge of Measurement. *Journal of Financial Crime*, 22(2).
- Chairi, N., Indriani, M., & Darwis. (2022). Kompetensi, Moralitas dan Sistem Whistleblowing dalam Pencegahan Fraud: Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintahan Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 22(1), 119–142. <https://doi.org/10.25105/mraai.v22i1.12655>
- Eldayanti, Indraswarawati, Y. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas dan Akuntabilitas terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 465–494.
- Everett, J., Neu, D. and Rahaman, A. . (2007). Accounting and the global fight against corruption. *Accounting, Organizations and Society*, 32(6), 513–542.
- Examinations, A. of C. F. (2022). *Occupational Fraud 2022: A Report to the nations*. Association of Certified Fraud Examiners.
- I Gede Adi Kusuma Wardana, Edy Sujana, M. A. W. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. *E Journal SI AK*, 8(2), 1–10.
- Inawati, W. A., & Sabila, F. H. (2021). Pencegahan Fraud : Pengaruh Whistleblowing System, Government Governance dan Kompetensi Aparatur Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(3), 731. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i03.p16>
- Indonesia, A. (2016). *Survey Fraud Indonesia*. Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter.
- Joseph, C., Omar, N.H., Janang, J.T., Rahmat, M., & Madi, N. (2021). Development of the University Fraud Prevention Disclosure Index. *Journal of Financial Crime*, 3.

- Junita Putri Rajana Harahap, Mhd. Dani Habra, Y. (2021). Analisis Pencegahan Kecurangan Akuntansi Dalam Mengelola Dana Desa Pada Desa Melati Ii Kecamatan Perbaungan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 32–45. <https://doi.org/10.30596/jrab.v21i1.6392>
- Kartadjumena, E., & Indriyati, N. (2021). Pengaruh Moderasi Kesadaran Anti Kecurangan dan Moralitas pada Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Pencegahan Kecurangan di Balai Besar Kementerian Perindustrian Kota Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi*, 7(1).
- Langoday, K. S. M. (2021). *Pengaruh Whistleblowing System dan Perilaku Etis terhadap Pencegahan Fraud*. Universitas Sanata Dharma.
- Leighton Silambi, I., Mannan, A., & Said, D. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing, dan Independensi terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 16(2), 122–132. <https://doi.org/10.26487/akrual.v16i2.25565>
- Meutia, T. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS)*, 2(2), 79–90.
- Monteiro, A. P. (2021). Impact Of The Internal Control And Accounting Systems On The Financial Information Usefulness: The Role Of The Financial Information Quality Polytechnic of Porto Joana Vale, Polytechnic of Porto Amélia Silva, Polytechnic of Porto Cláudia Pereira, Polytech. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(3), 1–14.
- Mufidah, M., & Sari, A. P. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Pencegahan Kecurangan (Fraud) sebagai Variabel Intervening pada Travel Haji dan Umrah di Kotamadya Jambi. *EKONOMIS: Journal of Economics and Business*, 2(2), 218. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v2i2.46>
- Mukoro, D. O., Faboyede, S. O., & Edefejirhaye, V. I. (2011). *Forensic Accounting and Fraud Management Perspective: An Integrated Approach*. H-Link Excel.
- Near, J. P., & Miceli, M. P. (1985). Organizational Dissidence: The Case Of Whistleblowing. *Journal of Business Ethics*, 4(1), 1–16.
- Nugraha, R., & Indah Bayunitri, B. (2020). The Influence of Internal Control on Fraud Prevention (Case Study at Bank BRI of Cimahi City). *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 2(3), 199–211. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i2.165>
- Nuryatno, M., & Wulandari, D. N. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran Anti-Fraud, Integritas, Independensi, dan Profesionalisme terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 4(2), 117–125.
- Okafor, O. N., Adebisi, F. A., Opara, M., & Okafor, C. B. (2020). Deployment of Whistleblowing as an Accountability Mechanism to Curb Corruption and Fraud in a Developing Democracy. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 33(6), 1335–1366. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2018-3780>
- Oktawina, M. (2023). *Pemko Padang Terima Penghargaan dari KPK RI*. Rri.Co.Id. https://rri.co.id/padang/daerah/397183/pemko-padang-terima-penghargaan-dari-kpk-ri?utm_source=news_video_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=general_campaign

- Omar, N., & Bakar, K. M. A. (2012). Fraud Prevention Mechanisms of Malaysian Government-Linked Companies: An Assessment of Existence and Effectiveness. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 8(1).
- Roemkenya Madolidi Handoyo, B., & Indah Bayunitri, B. (2021). The Influence of Internal Audit and Internal Control Toward Fraud Prevention. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 3(1), 45–64. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v3i1.181>
- Romadaniati, Taufeni Taufik, dan A. N. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud pada Pemerintah Desa dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227–237.
- Rosari, R., Zacharias, J., & Pono, M. R. (2021). Pencegahan Fraud Dalam Pelaporan Keuangan: Pendekatan Faktor Individu. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 24(2), 251–276. <https://doi.org/10.35591/wahana.v24i2.393>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for Business: A Skill Building Approach*. John Wiley & Sons.
- Triantoro, H. D., Utami, I., & Joseph, C. (2020). Whistleblowing System, Machiavellian Personality, Fraud Intention: An Experimental Study. *Journal of Financial Crime*, 27(1), 202–216. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2019-0003>
- Verschuuren, P. (2020). Whistleblowing Determinants And The Effectiveness Of Reporting Channels In The International Sports Sector. *Sport Management Review*, 23(1), 142–154.
- Yulian Maulida, W., & Indah Bayunitri, B. (2021). The Influence of Whistleblowing System Toward Fraud Prevention. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 2(4), 275–294. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v2i4.177>
- Yusrianti, H., Ghozali, I., & Yuyetta, E. N. (2020). Asset Misappropriation Tendency: Rationalization, Financial Pressure, and The Role of Opportunity (Study in Indonesian Government Sector). *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 373–382.